

DEFORMITAS POLITIK PARIWISATA: DAMPAK KONFLIK KEPENTINGAN TERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Sam Sachrul Mamonto^{1*}, Muhammad², Gustiana A. Kambo³, Magdalena Wullur⁴

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁴ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

*Korespondensi: samsmamonto@gmail.com

Citation (APA):

Momonto, S.S., Muhammad, M., Kambo, G. A., & Wullur, M. (2023). Deformitas Politik Pariwisata: Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 191–205. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3059>

Email Authors:

samsmamonto@gmail.com
alhamid.muhammad41@gmail.com
gustianakambo@yahoo.com
wullur@gmail.com

Submitted: 15 Desember 2023

Accepted: 20 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Samsachrul

Momonto, Muhammad Muhammad, Gustiana A Kambo, Magdalena Wullur

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai potensi wisata yang lengkap, baik dari wisata buatan, wisata alam, maupun wisata budaya. Namun pengembangan pariwisata tidak berjalan seiring dengan harapan membangun daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah dalam mencapai kemasyarakatan, pelayanan publik, dan daya saing. Anggaran pembangunan dirasionalisasi dan difokus ulang sehingga upaya percepatan pembangunan menjadi tantangan besar ketika realitas kemampuan finansial tidak sejalan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deformitas politik pariwisata sebagai dampak konflik kepentingan dalam kegiatan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan kunci sehingga pengembangan pariwisata lebih menekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, khususnya dalam hal pariwisata mampu mengubah struktur kekuasaan dan nilai-nilai di suatu kawasan wisata.

Kata kunci: Deformitas; Politik Pariwisata; Konflik Kepentingan

ABSTRACT

The East Bolaang Mongondow Regency possesses a comprehensive range of tourism potential, encompassing artificial, natural, and cultural attractions. Nevertheless, the growth of tourism does not align with the aspiration of enhancing the region's economic prosperity by boosting Regional Original Income, which is anticipated to yield advantages for the region in terms of community development, public services, and competitiveness. The development budget is streamlined and redirected to prioritize efforts to expedite development, which poses a significant challenge when the actual financial capacity does not align with planning and budgeting policies. The objective of this study is to examine the distortion of tourism policies resulting from conflicts of interest in the development of tourism villages in East Bolaang Mongondow Regency. This study employs a qualitative research approach, utilizing key informants. Consequently, the focus of tourism development lies predominantly on the interplay between politics and tourism, particularly in terms of tourism's potential to reshape the power dynamics and cultural values within a tourist destination.

Keywords: Deformity; Politics Tourism; Conflict of Interest

PENDAHULUAN

Deformitas dalam KBBI adalah kelainan atau abnormalitas dan memiliki 18 arti menurut KBBI. Diantaranya yaitu, kekurangan, kelemahan, penyimpangan, perbedaaan dan penyakit serta keanehan. Hal ini terindikasi di pengembangan desa wisata yang sarat terhadap kepentingan politik, entah karena desa tersebut merupakan basis konstituen ataukah daerah asal elit politik sehingga bisa berkembang. Pariwisata, menurut (Zendrato, 2014), merupakan fenomena kemasyarakatan yang kompleks, melibatkan berbagai aspek seperti manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan menjadi objek kajian

sosiologi. Kegiatan ini tidak hanya terjadi dalam ruang hampa, tetapi juga berhubungan dengan isu-isu sosial, politik, ekonomi, keagamaan, ketertiban, keramahtamahan, kebudayaan, kesehatan, termasuk institusi sosial yang mengaturnya. Fakta ini menunjukkan bahwa pariwisata adalah bidang multidisipliner, melibatkan berbagai ilmu, termasuk politik, di mana sektor ini dianggap sebagai *he mother of science* karena peranannya yang krusial dalam kebijakan pemerintah yang berisikan pertimbangan politis dan melibatkan banyak kepentingan (Spillane, 1987; Singgalen et al., 2019). Namun, kurangnya dampak pariwisata pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sering menghambat implementasi kebijakan yang efektif, mengakibatkan kesan negatif pada sirkulasi kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya merujuk pada visi pembangunan yang dijanjikan selama kampanye politik. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan daerah, visi merupakan rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga visi menjadi dasar dari arah pembangunan atau dari kondisi masa depan daerah yang diharapkan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan menjawab isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam pembangunan jangka menengah, dengan pendekatan melalui pengembangan desa wisata.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menjadi aset utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas pada masyarakat desa dalam mengembangkan wilayahnya. Pembangunan desa wisata adalah bagian terintegral dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Desa Wisata, yang merupakan bagian dari wisata pedesaan, mengandalkan potensi pedesaan yang unik dan menarik. Ini termasuk pengembangan dan pemberdayaan potensi tersebut sebagai produk wisata untuk menarik wisatawan (Sudibya, 2018).

Pengembangan desa wisata didasarkan pada lima prinsip utama yang mencerminkan pola pembangunan berimbang dan berlanjut. Pertama, pendekatan komunal dan individual, dimana pembangunan desa wisata mengakar pada pranata sosial adat, menekankan prinsip komunalitas sambil menghargai potensi dan aspirasi individu. Kedua, aspek material dan non-material, yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan jiwa dan raga, dengan memperhatikan dukungan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Ketiga, keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang, di mana strategi pembangunan jangka pendek harus terintegrasi dengan tujuan jangka panjang secara keseluruhan. Keempat, orientasi pasar yang seimbang antara wisatawan mancanegara dan nusantara, menargetkan kedua segmen pasar secara efektif. Kelima, pendekatan rasional dan beragama, menggambarkan bahwa pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu strategi penting yang diperlukan oleh penyelenggara negara, dengan mempertimbangkan aspek rasional dan nilai-nilai agama dalam pembangunan masyarakat desa.

Penelitian ini diarahkan pada pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa alternatif kebijakannya. Pada prosesnya, pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam tahapan rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Selanjutnya data BPS, Sulawesi Utara dalam Angka memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan dari mancanegara dan domestik pada Tahun 2020 sebanyak

31.915 wisatawan. Namun faktanya, di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pengembangan Desa Wisata tidaklah mudah, karena saat ini semua desa atau sebanyak 33 desa dari 35 desa wisata masih berstatus desa wisata rintisan. Fenomena yang ditangkap dari data PDRB sektor pariwisata, bila kesadaran bahwa cadangan sumber daya alam semakin menipis sebagai tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah perlu segera mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Furkan dkk., 2016). Karena Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki potensi pariwisata yang lengkap dari sisi wisata buatan, wisata budaya dan wisata alam.

Pengembangan Pariwisata di Indonesia, yang diamanatkan oleh Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan pemerintah dan lembaga yang terkait bertanggung jawab menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kepariwisataan. Ini untuk mendukung pembangunan kepariwisataan secara umum. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269, menekankan pentingnya pengembangan Desa Wisata. Namun, potensi Desa Wisata ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, (Nugroho, 2004) dan (Parson, 2006) menyarankan bahwa pengembangan Desa Wisata memerlukan dukungan politik yang kuat, terutama jika daerah tersebut merencanakan perkembangan Desa Wisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Pemerintahan Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, memiliki implikasi signifikan terhadap politik dan pemerintahan daerah. Namun, pengembangan desa wisata sering kali terhambat oleh konflik kepentingan, dimana aspek politik bertentangan dengan tujuan pengembangannya. Craik (1991:321) menekankan bahwa hubungan antara tuan rumah dan pengunjung/wisatawan harus dipahami dalam konteks hubungan internasional antara negara berkembang dan negara barat yang makmur. Menurut (Hall, 1994:138), merujuk pada (Simmons dan Dvorin, 1977), analisis kebijakan terkait lingkungan harus mencakup identifikasi komponen-komponen keadaan dan ciri-ciri dinamis lingkungan tersebut. Dalam konteks ini, tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan solusi teoritis tanpa mempertimbangkan batasan-batasan lingkungan. Standar ideal dalam menilai kebijakan harus relevan dengan lingkungan spesifik di mana kebijakan tersebut diterapkan. Lingkungan pembuatan kebijakan umum seharusnya melingkupi nilai-nilai, norma-norma, pemahaman, ideologi, dan pertimbangan teknis yang sesuai dengan kriteria pemilihan kebijakan, untuk kejelasan operasionalisasinya. Selain itu, pertimbangan terkait politik dalam kepariwisataan, terutama dalam memanfaatkan waktu senggang atau leisure time, tidak hanya merupakan hasil dari kekuasaan ekonomi dan sosial, tetapi juga dari perjuangan politik.

Konflik kepentingan dalam pembangunan pariwisata, khususnya desa wisata, merupakan isu krusial. Meskipun aturan dan prosedur telah disesuaikan, realisasi pembangunan desa wisata seringkali tidak semudah di daerah lain. Konflik kepentingan terjadi ketika penyelenggara negara, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan kinerja tugasnya (ACLC KPK, 2023). Untuk mengatasi hal ini, pembuat kebijakan harus dipisahkan atau disesuaikan sesuai dengan tingkatan jabatan yang linier. Tujuan pemisahan ini adalah untuk mengontrol dan mengawasi proses pembuatan

kebijakan di setiap jabatan. Setiap jabatan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat perlu diawasi dan dikendalikan secara ketat untuk menghindari kebijakan yang merugikan masyarakat dan menciptakan konflik kepentingan dalam kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian penting untuk dilakukan penelitian terkait teori kelembagaan baru yang dapat *manage* konflik kepentingan ke arah yang positif, Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah deformitas politik pariwisata sehingga memperlihatkan bagaimana dampak konflik kepentingan terhadap pengembangan desa wisata dan bagaimana kekuasaan dari seorang bupati bisa mewujudkan pengembangan desa wisata dan apa ada konflik kepentingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

METODE

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena sebagai konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Objek penelitian Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow. Informan kunci penelitian yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Desa atau yang disebut Sangadi desa wisata, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekertaris Daerah. Fokus penelitian pada Desa Wisata. Teknik Pengumpulan Data melalui studi Literatur, wawancara, obeservasi, dan observasi serta dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan selanjutnya dibuat keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Bupati Dalam Mewujudkan Pengembangan Desa Wisata

Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara negara harus beroperasi sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Kinerja seorang pejabat publik dinilai berdasarkan berbagai aspek, termasuk profesionalisme, kemampuan, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya. Profesionalisme pejabat publik tercermin dari keahlian mereka yang sejalan dengan jabatan yang diemban, serta kemampuan dalam mengelola tugas pokok dan fungsi yang ditugaskan. Menurut (Fuqoha,2015), jika semua pejabat menjalankan tugas mereka sesuai aturan, konflik kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja dapat dihindari. Konflik kepentingan sering kali dipicu oleh permasalahan birokrasi. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan yang baik di instansi pemerintah tidak bisa diremehkan. *Good Governance*, yang sangat menekankan pentingnya penerapan etika kerja, berperan penting dalam mencegah konflik kepentingan dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut (Sulistiyana, 2021) menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* ini esensial untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya efisien tetapi juga etis dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Pemegang kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan politik, khususnya dalam perumusan suatu kebijakan publik, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini meliputi kondisi perekonomian, persyaratan-persyaratan prosedural, komitmen yang dibuat sebelumnya, serta tekanan politik dan sosial. Misalnya, ketika seorang Bupati menghadapi tekanan social dan politik dalam membuat keputusan terkait kebijakan publik, keputusan tersebut sering kali dirancang berdasarkan keuntungan politik, yang dianggap

sebagai cara mencapai tujuan partai atau kelompok kepentingan tertentu. Pendekatan ini sering digunakan oleh para ahli politik untuk mempelajari dan menilai proses pembentukan kebijakan. Konflik kepentingan, khususnya bagi seorang Bupati, muncul ketika mereka menempatkan seseorang dalam posisi yang membutuhkan kepercayaan tinggi, seperti penunjukan kepala desa pelaksana tugas, sementara memiliki kepentingan pribadi dan profesional yang saling bertentangan. Persinggungan kepentingan menyulitkan kepala desa di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konflik kepentingan-kepentingan dapat muncul bahkan tanpa menimbulkan suatu tindakan yang tidak pantas atau tidak etis, namun bisa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap individu dan/atau profesi tersebut. Tercampurnya antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik menjadi sumber konflik berbagai kepentingan ini. Dampak dari suatu konflik kepentingan bisa sangat signifikan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian tugas utama dari pejabat publik, yakni melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan publik dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik untuk memastikan integritas dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Pengembangan Desa Wisata

Permasalahan yang sering muncul antara potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia terletak pada kurangnya optimalisasi sumber daya alam untuk dijadikan potensi wisata. Contoh nyata dari hal ini adalah kurangnya inisiatif dalam pengadaan fasilitas dan prasarana oleh masyarakat lokal. Fasilitas dan prasarana tersebut sangat penting dalam mendorong partisipasi segenap masyarakat serta menjamin adanya akses ke sumber daya fisik, sebagai prasyarat utama perkembangan desa wisata.

Selain itu, ada juga tantangan dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 terkait Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269). Menurut (Maesa dan Wulandari, 2018) serta (Indriani, 2020), potensi ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu daerah merencanakan pengembangan desa wisata, diperlukan kebijakan politik yang kuat (Nugroho, 2004; Parson, 2006). Kebijakan ini harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan catatan bahwa kepentingan tersebut harus linier dan saling menguntungkan. Jika tidak, hal ini bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan desa wisata. Dari sisi kebijakan dan praktik, ada perlunya sinergi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam merencanakan dan mengelola sumber daya alam untuk tujuan wisata. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang potensi sumber daya alam mereka, penguatan kapasitas lokal dalam pengelolaan dan pemasaran wisata, serta pengembangan infrastruktur dan layanan yang mendukung. Dengan pendekatan terpadu dan kolaboratif, potensi sumber daya alam dan potensi sumberdaya manusia dapat dioptimalkan secara efektif untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak.

Konflik kepentingan dalam isu-isu tertentu, seperti pengembangan desa wisata, memiliki keterkaitan erat dengan tingkat perhatian yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak-pihak di luar pemerintahan yang berhubungan dengan pejabat pemerintahan. Penentuan konflik kepentingan adalah proses yang bertujuan agar suatu masalah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Proses ini mengeksplorasi bagaimana masalah dipandang, dirumuskan, dan bagaimana ia mengarahkan perhatian publik serta masuk ke dalam arena politik. Aspek politik adalah aspek yang sangat luas dan dapat ditemukan dalam segala

bidang, termasuk dalam kebijakan publik. Meskipun seringkali kebijakan publik hanya dianggap sebagai masalah administratif, kenyataannya, kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari aspek politik. Muatan politis ini, terutama berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengembangan desa wisata dan politik pariwisata, dapat diidentifikasi sejak awal pembentukan kebijakan. Kebijakan publik dalam konteks ini sering kali mencerminkan berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda, baik dari pemerintah maupun pihak lain yang terlibat. Dalam hal pengembangan Desa Wisata, hal ini melibatkan pertimbangan berbagai aspek seperti kebutuhan lokal, potensi sumber daya alam dan manusia, serta dampak ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penanganan konflik kepentingan tidak hanya memerlukan pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan politik yang mempertimbangkan pandangan dan kepentingan berbagai pihak. Pendekatan ini harus mampu memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kesepakatan antara berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks pengembangan pariwisata yang berkaitan erat dengan politik, pernyataan dari informan kunci menyoroti proses perumusan kebijakan publik. Proses ini melibatkan usulan-usulan yang dirancang untuk mengembangkan rencana, metode, dan strategi yang bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, serta memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan publik yang ada. Dalam hal pengembangan pariwisata, ini berarti menciptakan kerangka kerja yang efektif untuk memajukan sektor ini, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berperan, mulai dari kepentingan lokal hingga pengaruh politik yang lebih luas. Kebijakan publik dalam bidang pariwisata harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keberlanjutan lingkungan, dampak ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat lokal, serta kebutuhan pengembangan infrastruktur yang memadai. Selain itu, proses ini juga harus mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, industri pariwisata, masyarakat lokal, dan kelompok lingkungan. Pentingnya perumusan kebijakan ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan solusi yang komprehensif dan praktis, yang tidak hanya menangani isu-isu langsung terkait dengan pariwisata, tetapi juga membantu dalam mengatasi tantangan yang lebih besar seperti ketidakseimbangan ekonomi, masalah lingkungan, dan isu sosial. Dengan demikian, perumusan kebijakan publik dalam konteks pengembangan pariwisata harus menjadi proses yang inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang terus berkembang.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa semua aktor yang berperan dalam kebijakan publik dilingkup eksekutif sudah berperan dengan baik sesuai dengan peran dan kepentingan yang melekat. Pada penelitian ini lebih mengutamakan kebijakan sesuai arahan dari bupati yang dilakukan terintegrasi dalam satu tujuan. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda), menjadi kesepakatan bersama antar SKPD, sehingga pertimbangan dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah bukan hanya untuk kepentingan sebagian orang, atau berpikir pariwisata hanyalah urusan Dinas Pariwisata tetapi harusnya lintas SKPD, sebab jika demikian akan terindikasi melestarikan egosektoral antar SKPD.

Kebijakan untuk membuat peraturan atau produk hukum terkait dengan menunjang Desa Wisata penting dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata yaitu Desa Atoga Timur dan Desa Bukaka. Berikut ini kita membahas peran dari masing-masing SKPD terkait untuk mewujudkan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai berikut: Dalam penelitian ini, Bapak Eko, yang menjabat

sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan berperan sebagai informan, memberikan pernyataan penting mengenai proses formulasi kebijakan terkait Peraturan Daerah RIPPARKAB. Beliau menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan ini belum selesai, dengan beberapa dokumen penting masih dalam tahap penyelesaian. Dokumen-dokumen tersebut termasuk Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan kajian akademis, yang rencananya akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Penyelesaian dokumen-dokumen ini sangat penting untuk mendukung peraturan yang akan diterbitkan oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Nomor 143 Tahun 2018. Proses formulasi kebijakan ini menunjukkan pentingnya dokumen-dokumen seperti KLHS dan kajian akademis dalam pengembangan kebijakan publik, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata daerah. KLHS adalah alat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh, sedangkan kajian akademis memberikan dasar ilmiah dan analisis terperinci tentang potensi, tantangan, dan dampak dari kebijakan yang diusulkan. Dalam konteks Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata, dokumen-dokumen ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak hanya mendorong pengembangan pariwisata tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Penyelesaian dokumen ini menjadi langkah kunci dalam menentukan arah dan efektivitas kebijakan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya terkait dengan pembangunan Desa Wisata, bahwa:

“untuk pariwisata 3 tahun terakhir fokus proses untuk sarana baru pangsa pasar yang sebelumnya tidak jelas dari mana, dengan harapan untuk pendamping desa segera dilantik sehingga bisa mempengaruhi penyusunan anggaran, dengan adanya pokdarwis uang yang masuk dipintu masuk setiap destinasi bukan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, yang akhirnya tidak tahu masuk di mana dan ketika ditelusuri, ternyata sekdes menjadi tenaga honor pariwisata, Sekdes menjadi THL. Selanjutnya perlu penegasan bupati ke para kepala desa yang membiarkan aparat dan masyarakat sekitar sebagai miras sampai mabuk di lokasi padahal sudah dibentuk homestay. Juga diperlukan pelatihan kepada masyarakat jalan yang dilalui itu tentang kesepakatan pemerintah dalam hal ini membutuhkan intervensi bupati mengumpulkan kepala desa dalam program bupati sehingga pariwisata bisa berkembang.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan, mengidentifikasi potensi pariwisata, dan komitmen masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di daerah tersebut, sesuai dengan teori kebijakan publik. Berdasarkan kebutuhan, potensi, dan komitmen masyarakat ini, Dinas Pariwisata melakukan analisis untuk menentukan aspek-aspek apa saja yang layak diusulkan untuk dijadikan kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam program dan kegiatan, termasuk sub-kegiatan, sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Proses ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemahaman menyeluruh tentang potensi lokal dalam pembuatan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Pernyataan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai teori kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan politik dalam kebijakan publik. Dalam proses perumusan kebijakan publik, terdapat suatu konsep yang dikenal sebagai desain kebijakan atau 'policy design'. Tujuan dari desain kebijakan ini adalah untuk mengembangkan rencana, metode, dan solusi yang

bertujuan meringankan masalah, memenuhi kebutuhan, dan mengambil tindakan menyelesaikan permasalahan publik. Dalam konteks pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memainkan peran kunci sebagai regulator dan pengusul kebijakan pariwisata. Mereka bertanggung jawab untuk mengajukan usulan kebijakan yang akan membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pariwisata dan mendukung pertumbuhan serta pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana instansi pemerintah terkait secara aktif terlibat dalam menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat membawa perubahan positif dan memajukan kepentingan publik di bidang pariwisata.

Ibu Wiwik Kurnia sebagai Kaban Keuangan sebagai informan menyatakan terkait pengembangan Desa Wisata, bahwa:

“pengembangan Desa Wisata harus dimulai dengan kebijakan pariwisata Bolaang Mongondow Timur sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan bagi PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga diperlukan kerja tim dari semua SKPD untuk merumuskan kebijakan pariwisata yang tidak tumpang tindih dan egosektoral, saatnya untuk semua SKPD bersama untuk meningkatkan sektor pariwisata, jika legislatif tidak diberikan pemahaman soal pariwisata oleh bupati maka mereka akan menggagalkan bukan untuk tujuan pariwisata.

Selanjutnya, Bapak Hendra, yang menjabat sebagai Asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran penting dalam proses pengembangan kawasan wisata. Tugas utamanya adalah melakukan pengarahan dan pembinaan secara kelembagaan terhadap para sangadi, yaitu pemimpin lokal, untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan-kawasan yang dinilai memiliki potensi besar sebagai objek wisata. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada dan menggalang komitmen dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Bapak Hendra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para sangadi mampu memahami dan melaksanakan strategi pengembangan wisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan. Keterlibatan dan komitmen masyarakat setempat dianggap sangat krusial dalam upaya ini, karena mereka merupakan bagian integral dari daya tarik wisata dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

“penting untuk semua bekerja tim dan memasukkan perencanaan dan penganggaran untuk 35 desa wisata. Diperlukan sinergitas untuk keterkaitan dengan program kerja bupati. Jika ada kepala desa yang tidak sejalan sekiranya bupati dapat menempatkan Plt di desa wisata yang tidak berkembang. Ini sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya warga yang tinggal di sekitar objek wisata yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga memiliki beberapa peranan dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada umumnya, masyarakat akan mengusulkan mengenai pembangunan infrastruktur atau fasilitas di objek wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian, masyarakat juga dapat mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengenai potensi wisata yang ada supaya potensi wisata tersebut mendapatkan perhatian dan menjadi sasaran kebijakan pemerintah di sektor pariwisata.

Dalam konteks pembahasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, peran legislatif menjadi krusial. Anggota legislatif memiliki tanggung jawab untuk mendorong penerapan anggaran yang telah dibahas dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang pada tingkat desa. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk para pengelola daerah atau objek wisata, warga setempat, dan para dinas terkait. Mereka bersama-sama berdiskusi dan menyepakati pengalokasian dana untuk proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas yang dianggap esensial dalam mendukung pertumbuhan serta pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Dengan begitu, legislatif berperan aktif tidak hanya dalam persetujuan anggaran tetapi juga dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua pihak terkait, terutama masyarakat lokal dan pengelola pariwisata, demi kemajuan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya Kaban Bappeda Bapak James, menyatakan bahwa:

“untuk mekanisme anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas, itu dilakukan melalui Musrenbang di tingkat desa bersama dinas terkait, seperti dengan Dinas Pariwisata, dengan Pekerjaan Umum, juga dengan legislatif” Kemudian, Sangadi Atoga Timur sebagai inisiasi objek wisata River View menyatakan bahwa:

“kita mengundang serta memberdayakan masyarakat untuk mengelola Bumdes dan duduk bersama pemerintah desa, DPRD untuk membahas mengenai anggaran untuk wisata ini. Bagaimana kedepannya, masyarakat biasanya memberikan usulannya melalui itu”

Warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi objek atau daerah wisata memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program pariwisata. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan fasilitas parkir yang dapat dikelola oleh warga di sekitar objek wisata, yang tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengunjung tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, banyak warga di sekitar ketiga daerah atau objek wisata yang diteliti berinisiatif untuk berwirausaha, seperti dengan membuka warung untuk berjualan di sekitar daerah atau objek wisata. Usaha-usaha ini tidak hanya menaikkan tingkat perekonomian desa tetapi juga perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Kehadiran pedagang di sekitar objek wisata juga memberikan dampak positif terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Dengan adanya pedagang yang menjual oleh-oleh, makanan, dan minuman, pengunjung merasa lebih nyaman dan terlayani selama kunjungan mereka. Hal ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pengalaman wisata mereka dengan lebih lengkap, termasuk menikmati kuliner lokal dan membeli cenderamata khas daerah. Kehadiran pedagang ini juga menambah daya tarik objek wisata, menciptakan suasana yang lebih hidup dan autentik.

Di sisi lain, jika tidak ada pedagang yang berjualan di sekitar objek wisata, sangat mungkin terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas dan kenyamanan di objek wisata, yang merupakan aspek penting dalam pengalaman wisata. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam menyediakan fasilitas dan layanan di sekitar objek wisata menjadi faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan pariwisata di suatu daerah, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi lokal.

Pemahaman terintegrasi tentang pengembangan kawasan wisata berbasis pedesaan menekankan integrasi masyarakat lokal sebagai aspek penting. Menurut (Lindberg dan Hawkins, 1995), mengintegrasikan masyarakat lokal sebagai mitra sejajar dalam desain, pelaksanaan, dan penggunaan lahan serta sumber daya adalah kunci dalam membentuk subsistem pariwisata yang efektif. Keberhasilan perkembangan wisata sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi langsung masyarakat di Desa Wisata, yang diutamakan, meliputi peran mereka sebagai pelaku pengembangan wisata, seperti menjadi pemandu wisata atau pelaku pertunjukan seni. Partisipasi ini tidak hanya mendukung perkembangan Desa Wisata, tetapi juga menjadi potensi wisata itu sendiri. Sementara itu, partisipasi tidak langsung mencakup pemberian layanan yang berkualitas kepada pengunjung, seperti menyediakan homestay, konsumsi, serta merawat dan memelihara kehidupan desa sebagai potensi wisata. Hal ini menciptakan ruang interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal, yang merupakan elemen penting dalam memberikan pengalaman yang otentik dan berkesan bagi pengunjung. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam berbagai aspek pengembangan wisata pedesaan tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga membantu mempertahankan keunikan dan keaslian budaya serta lingkungan desa.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai unsur pelaksana di bidang pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, termasuk tugas-tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Kepentingan Dinas Pariwisata ini mencakup pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan tujuan untuk memajukan pariwisata daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Melalui peran ini, Dinas Pariwisata berupaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial daerah, sejalan dengan kebijakan dan arahan yang diberikan oleh Bupati. Berdasarkan pernyataan dari Sangadi (Pemimpin Desa) Desa Bukaka yaitu:

“sangat disadari bahwa kepentingan kami untuk mengembangkan desa wisata harus sesuai kepentingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam kebijakan pariwisata adalah untuk mewujudkan RPJMD yaitu untuk kepentingan meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan dimulai dari Desa kami”

Menurut teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Dunn,1999), tahapan kedua dalam proses kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Tahap ini melibatkan desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kesesuaian antara teori ini dan realitas yang terjadi dapat dilihat melalui pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, yang mengindikasikan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerapkan prinsip ini dalam praktiknya. Dinas Pariwisata di daerah ini telah menetapkan kepentingan untuk mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memiliki fokus khusus dalam formulasi kebijakan pariwisata. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di daerah tersebut. Peningkatan lama tinggal wisatawan diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan okupansi hotel dan permintaan terhadap layanan penyedia jasa wisata. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan industri pariwisata secara keseluruhan, tetapi juga akan memberi manfaat

ekonomi yang signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Strategi kebijakan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata, hingga pengembangan produk wisata yang unik dan menarik. Dengan demikian, Dinas Pariwisata bekerja untuk memastikan bahwa setiap aspek kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi wisatawan serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha lokal, komunitas, dan pemerintah daerah, menjadi kunci dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan ini secara efektif.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang berperan sebagai pelaksana kebijakan pariwisata, berusaha memenuhi kepentingan yang dapat memacu dampak ekonomi yang signifikan. Jika kedua kepentingan ini terpenuhi, pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik, menghasilkan efek pengganda bagi sektor terkait. Masyarakat, sebagai warga negara dan aktor penting dalam kebijakan, berperan dalam formulasi kebijakan pariwisata. Mereka memiliki kepentingan dan aspirasi yang patut diperjuangkan menjadi kebijakan yang menguntungkan. Kepentingan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, termasuk dalam kebijakan pariwisata, sangat terkait dengan kehidupan mereka. Sangadi, sebagai pemimpin desa, memiliki kepentingan utama dalam kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Semua Sangadi berkepentingan agar objek wisata mendapatkan perhatian pemerintah dan menjadi fokus kebijakan, yang jika terwujud, dapat menguntungkan masyarakat secara langsung.

Peningkatan kunjungan wisatawan karena kebijakan pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata. Masyarakat juga berkepentingan dalam pembangunan infrastruktur, seperti akses jalan menuju objek wisata, yang memudahkan mereka. Pengelola objek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur membutuhkan kebijakan pariwisata dan regulasi daerah yang efektif untuk pengelolaan objek wisata, yang mendukung operasional dan pengembangan mereka. Sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki potensi besar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Wisatawan yang berwisata di daerah tersebut berkontribusi pada perekonomian lokal melalui pengeluaran akomodasi, transportasi, pembelian cinderamata, dan keperluan lain.

Berdasarkan pernyataan informan dalam penelitian ini, terdapat kesesuaian antara sumber-sumber berbeda yang menyatakan bahwa kebijakan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memberikan dampak positif. Kebijakan ini telah menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap kebijakan publik memiliki hambatan dalam implementasinya, termasuk kebijakan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hambatan-hambatan ini harus segera diatasi agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serius dalam mengelola pariwisata tetapi masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kerjasama dengan masyarakat lokal penting, tetapi masih terdapat kurangnya kesadaran, termasuk dalam hal pembayaran tiket masuk objek wisata oleh masyarakat lokal. Komitmen tinggi dari bupati dan kesadaran masyarakat lokal diperlukan untuk mendukung kebijakan pariwisata. Masyarakat harus menjaga dan mentaati peraturan, termasuk membayar tiket masuk objek wisata meskipun mereka merupakan penduduk sekitar (Movahedi et al., 2020).

Selain hambatan SDM, terdapat juga hambatan geografis dalam pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berinovasi dalam menciptakan objek wisata baru yang dapat menjadi ikon wisata (Sushanti dan Kurniawan, 2018). Legitimasi kebijakan pengembangan pariwisata sedang diproses melalui penyelesaian RIPPARDA dan Peraturan Bupati baru terkait Desa Wisata. Masyarakat di sekitar objek wisata berperan dalam mendukung program pariwisata, termasuk menyediakan fasilitas parkir dan berwirausaha sebagai pedagang. Upaya ini meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat. Pengelolaan manajemen dari kelembagaan baru dan pemahaman tentang deformitas politik pariwisata diperlukan untuk wawasan mendalam tentang cara pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam konteks politik.

Keputusan Kebijakan. Pariwisata dibuat, oleh siapa, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor apa. Ini melibatkan analisis terhadap dinamika politik, interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, dan peran aktor politik dalam menentukan arah kebijakan pariwisata. Ditemukan bahwa penetapan 35 desa wisata tidak disosialisasikan dengan baik oleh para kepala desa sehingga mereka mempunyai kepentingan sendiri untuk memakai anggaran untuk lainnya bukan untuk kepentingan pengembangan pariwisata.

Tujuan dan Prioritas. Bagaimana tujuan dan prioritas dalam pengembangan pariwisata dipilih dan dirumuskan. Pemahaman tentang pemaknaan di balik pilihan-pilihan ini dapat membantu mengidentifikasi apakah kebijakan pariwisata difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, pengembangan sosial, atau tujuan lainnya. Prioritas yang dikembangkan adalah BUMDes namun demikian tidak untuk prioritas pengembangan desa wisata tetapi lebih pada pemanfaatan untuk kepentingan kekuasaan.

Alokasi Sumber Daya. Termasuk anggaran, infrastruktur, dan personil, ditentukan untuk sektor pariwisata. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana kepentingan politik dapat mempengaruhi alokasi sumber daya ini. Ditemukan bahwa kepala desa tidak tahu soal dana afirmasi digunakan untuk wisata pada target PADes belum dibuat.

Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata dipromosikan atau dibatasi oleh politik pariwisata. Pemahaman tentang hubungan antara aktor politik dan masyarakat lokal dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana aspirasi dan kebutuhan komunitas dipertimbangkan dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat tidak bisa membedakan desa wisata dan wisata desa serta tidak disosialisasikan dengan baik tentang desa wisata sehingga konflik kepentingan menjadi lebih menjauhkan pengembangan desa wisata.

Dampak Sosial dan Lingkungan. Kebijakan pariwisata memengaruhi masyarakat lokal dan lingkungan. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana politik pariwisata dapat mempengaruhi keberlanjutan sosial dan lingkungan di destinasi pariwisata. Masyarakat merasa senang dengan penetapan desa wisata tetapi tidak sepatutnya menerima tamu datang ke desa mereka sehingga ini menjadi anomali pada saat kunjungan wisata yang dilakukan oleh tamu domestik dan diprediksi akan lebih parah jika kedatangan tamu dari luar negeri.

Keterwakilan dan Kepentingan Spesifik. Analisis tentang keterwakilan dan kepentingan kelompok-kelompok spesifik dalam politik pariwisata, termasuk industri pariwisata, kelompok masyarakat adat, kelompok lingkungan, dan sektor swasta. Masyarakat memiliki kepentingan untuk pembangunan padat karya bukan pada pengembangan pariwisata.

Studi pengembangan pariwisata dalam perspektif kelembagaan, khususnya pada kelembagaan baru, melibatkan analisis tentang bagaimana struktur, fungsi, dan peran kelembagaan dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata di suatu wilayah atau negara.

Identifikasi Masalah dan Peluang. Kelembagaan baru dalam pengembangan pariwisata sering kali muncul karena adanya masalah yang belum terpecahkan atau peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Studi awal harus mencakup identifikasi masalah utama yang dihadapi dalam sektor pariwisata dan juga peluang yang dapat ditingkatkan.

Peran Kelembagaan. Analisis peran yang dimainkan oleh berbagai kelembagaan dalam industri pariwisata penting. Ini dapat mencakup pemerintah, badan pariwisata, pihak swasta, LSM, dan kelompok masyarakat setempat. Studi ini akan membantu dalam menentukan bagaimana peran baru dapat mengisi celah atau meningkatkan peran yang ada.

Struktur Organisasi. Pemahaman tentang struktur organisasi kelembagaan baru sangat penting. Ini mencakup komposisi dewan direksi, keanggotaan, hierarki, dan mekanisme pengambilan keputusan. Struktur organisasi yang baik dapat memfasilitasi kerja sama yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat.

Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personil, dan infrastruktur juga harus dianalisis. Kelembagaan baru mungkin perlu mengidentifikasi sumber daya tambahan atau mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

Kebijakan dan Regulasi. Penyelidikan tentang kerangka hukum dan regulasi yang mengatur industri pariwisata di wilayah atau negara tersebut sangat penting. Ini akan membantu kelembagaan baru dalam memastikan bahwa operasinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keterlibatan Pihak Terkait. Studi ini juga perlu mempertimbangkan keterlibatan aktor-aktor utama dalam industri pariwisata, seperti pemilik usaha pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah. Membangun dukungan dan keterlibatan dari pihak-pihak ini adalah kunci dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Evaluasi Dampak. Setelah kelembagaan baru didirikan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampaknya terhadap pengembangan pariwisata. Ini melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran pencapaian tujuan, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Penekan dalam perspektif kelembagaan baru, studi pengembangan pariwisata dapat difokuskan pada pemahaman tentang "Politik Pariwisata." Politik Pariwisata mengacu pada pemaknaan atas bagaimana kebijakan, keputusan, dan tindakan terkait pariwisata diputuskan, dirancang, dan dilaksanakan oleh aktor-aktor politik dan lembaga-lembaga terkait dalam suatu wilayah atau negara.

SIMPULAN

Pemahaman tentang Politik Pariwisata penting karena mencerminkan bagaimana kebijakan dan praktik dalam industri pariwisata dikendalikan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat berdampak pada berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga budaya dan lingkungan. Analisis ini dapat membantu dalam merancang strategi kelembagaan baru yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pentingnya pengawasan pada keberpihakan anggaran untuk desa yang terlepas dari dampak politik pada pengembangan desa wisata. Selanjutnya pengembangan BUMDes harus disterilkan dari kepentingan kepala desa yang menggunakan BUMDes untuk kepentingan pribadi dengan beralasan bahwa tidak paham cara pengembangan desa wisata. Penelitian kedepannya diharapkan dapat meneliti tentang konflik kepentingan secara terintegrasi dengan APBN dan APBD Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLC KPK. (2023). Konflik Kepentingan. <https://aclc.kpk.go.id>
- BPS. (2020). Sulawesi Utara dalam Angka
- Craik, J. (1991). *Resorting to Tourism: Cultural Policies for Tourism Development in Australia*. North Sydney: Allen & Unwin
- Dunn, William. (1999). *Analisa Kebijakan Publik*. (Samodra Wibawa, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fuqoha. (2015). Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional swala : *Jurnal Administrasi Negara* (dalam bahasa Inggris). 3 (3): 30. doi:10.30656/sawala.v3i3.288. ISSN 2598-4039.
- Furkan, L. M., H. Sudiarta dan Agusdin. (2016). Dinamika Inovasi Pada Kluster Industri Pariwisata Bali melalui Kerjasama Pemerintah Universitas Industri. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. e-ISSN: 2477-1767, Vol. 4, No. 2.
- Indriani, E. (2020). Membangun Daya Saing Industri Kreatif-Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Menuju *One Village One Product*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. ISSN: 2579-5597, Vol. 5, No. 1.
- Maesa, R. and D. Wulandari. (2018). The Development of Creative Economy: Case Study of Jodipan Colorful Village in Malang. *Universitas Negeri Malang Economics Development Analysis Journal*. Vol. 7 (3).
- Movahedi, R., L. Z. Sayar, M. Pouya, G. Aeini, and M. Bahadori. (2020). Factor Affecting Rural Tourism Cluster Development (Case Study: Ashtaran Village, Touyserkan Country). *Journal of Research and Rural Planning*, e-ISSN: 2383-245, Vol. 9, No. 3, serial No. 30: 53-69.
- Nugroho D. R. (2004). *Kebijakan Publik (formulasi implemetasi dan evaluasi)*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Parson, S. (2006). *Public Policy*. Kencana Premada Group: Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

- Rose, R. (1969). *The Power Elite*. New York, Oxford University Press.
- Simmons, Robert H. and Dvorin, Eugene P. (1977). *Public Administration: Value, Policy and Change*. Washington, DC: Alfred Publishing Co. Inc
- Singgalen, Y. A., G. Sasongko, and P. G. Wiloso. (2019). *Community Participation in Regional Tourism Development: A Case Study in North Halmahera Regency-Indonesia*. Regional Development, Entrepreneurship and Sustainability Center.
- Spillane J. J. (1987). *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sudibya, B. (2018). *Wisata dan Desa Wisata*. *Jurnal Bappeda Litabang*. Vol.1, No 1, April: 21-25.
- Sulistiyana, D. B., & Seran, G. G. (2016). *Pengelolaan Konflik Kepentingan*. dalam Modul Intergritas Bisnis KPK, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta.
- Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Desa Wisata Nomor 143 Tahun 2018
- Susanty, A., N. B. Puspitasari, dan C. Valinda. (2017). *Pengembangan Strategi Pariwisata Berbasis Ecotourism pada Klaster Pariwisata, Borobudur-Dieng, Jawa Tengah*. *Jurnal Teknik Industri*, Universitas Diponegoro. Vol. XII, No. 1.
- Sushanti, I. R. and A. Kurniawan. (2018). *Konsep Kampung Wisata Belanja Berkelanjutan Klaster Industri Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP) di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram*. *Jurnal Planoearth*. ISSN 2502-5031, Vol. 3, Hal. 23-29.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zen, M. H and D. Wulandari. (2016). *Development Strategy of the Tourism Industry in Banyuwangi Regency (Case Study: Natural Park Ijen Crater Banyuwangi)*. *IOSR Journal of Business and Management*. e-ISSN: 2278-487X, Vol. 18, Issue 8, Ver. 1: 41-47
- Zendrato, S. K. (2014). *Kebudayaan dan Pariwisata Nias*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

PROFIL SINGKAT

Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si. lahir di Modayang, 16 Desember 1973 merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Program Doktor di program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.